



Dana Transfer Dipangkas Rp112 M

Dana Transfer Dipangkas Rp112 M

REPORTER MUHAMMAD MUCHTASIM
EDITOR ILHAM WASI

MAKASSAR, FAJAR—Alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Sulsel cukup mengejutkan. Dana transfer tersebut dipangkas Rp112 miliar.

AWALNYA, Sulsel bakal menerima kucuran dana segar sebesar Rp4,9 triliun. Angka yang cukup fantastis ini rencananya akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan daerah, dengan rincian Rp3,280

triliun untuk Dana Transfer Umum (DAU), Rp1,615 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), serta insentif sebesar Rp30,573 miliar.

📖 Baca Dana... Hlm 11



Dana Transfer Dipangkas Rp112 M

❖ Lanjutan Halaman... 9

Namun, harapan ini harus sedikit tertunda. Pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan penyesuaian, yang berujung pada pemangkasan alokasi dana transfer ke Sulsel. Alhasil, total dana yang akan diterima Sulsel menyusut menjadi Rp4,7 triliun.

Secara rinci, pemangkasan ini berdampak pada dua pos utama. DAU yang semula dialokasikan sebesar Rp3,280 triliun, kini hanya menjadi Rp3,226 triliun. Artinya, ada pengurangan sebesar Rp25,061 miliar.

Tak hanya DAU, DAK juga mengalami nasib serupa. Dari alokasi awal Rp1,615 triliun, kini hanya tersedia Rp1,528 triliun. Terdapat pemangkasan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp87,153 miliar. Hanya alokasi untuk insentif daerah tidak mengalami perubahan, tetap Rp30,573 miliar.

Pj Gubernur Sulsel,

Prof. Fadjry Djufry, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah daerah, kata dia, harus siap menjalankan kebijakan ini.

Dia mengakui bahwa beberapa daerah khawatir dengan target-target capaian pemerintah daerah. Dengan adanya pemangkasan anggaran, maka harus ada penyesuaian dalam program-program yang akan dikerjakan, terutama bagi dana infrastruktur yang hampir nihil karena tidak masuk dalam mandatori. Kondisi ini akan membuat infrastruktur mandek di daerah.

"Oleh karena itu, memang bupati wali kota terpilih nanti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian mana yang menjadi prioritas," terangnya saat Pemprov Sulsel menerima Rapat Koordinasi dan Entry

Meeting yang digelar oleh BPKP Perwakilan Sulsel, terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah se-Sulsel tahun 2025, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 11 Februari.

Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai lima mandatori pengalokasian anggaran pemerintah daerah. Yakni untuk mengatasi kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pendidikan, dan sektor kesehatan. "Ini mandatori yang memang diharapkan tetap bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Kehadiran BPKP, kata Prof. Fadjry, agar anggaran yang terbatas tersebut bisa optimal dan tepat sasaran. "Harapan kita kehadiran teman-teman BPKP ini semua program yang diarahkan Pak Presiden kita bisa jalankan, cuma akan ada penyesuaian-penyesuaian target," katanya.

Prof. Fadjry mengaku saat ini fokus untuk

menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar bisa berjalan dengan baik di Sulsel. Ia berharap agar hasil review BPKP terhadap perencanaan Pemprov Sulsel bisa mendukung program pusat.

"Nah, itu teman-teman BPKP nanti yang akan melihat, mana kita prioritaskan, yang mana sedikit kita lenturkan dan sebagainya, seperti itu," imbuhnya.

Saat ini, beberapa kementerian dan lembaga kementerian perwakilan di daerah mulai menerapkan semi WFH. Waktu kerja di kantor dipangkas 1-2 hari. Prof. Fadjry menyebut, untuk operasional dan urgensi Pemprov masih akan bekerja seperti biasanya, lima hari berkantor dalam seminggu.

"Kalau di daerah sih saya lihat sih masih oke saja, kalau saat ini belum, tidak tahu kalau evaluasi berjalan dalam satu atau dua bulan dan harus kita